



BULETIN

PARLEMENTARIA

NOMOR: 825/VII/2014

III/JULI 2014



Bali Perlu Perhatian Khusus Ketersediaan Energi



KEGIATAN DPR-RI MINGGU KETIGA JULI 2014

Rapat Paripurna tanggal 10 Juli yang salah satu agendanya adalah pembacaan Pidato Penutupan Masa Sidang IV, dilaporkan mengenai fungsi legislasi yang dilaksanakan selama Masa Sidang IV ini. Selain itu, Rapat Paripurna tanggal 8 Juli, Ketua Pansus RUU tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD melaporkan materi RUU tersebut. Berikut ringkasannya:

Oleh: Ketua DPR-RI, DR.H. Marzuki Alie

Pelaksanaan Fungsi Legislasi (Pidato Penutupan Masa Sidang IV)

Dalam pelaksanaan fungsi legislasi, pada masa sidang ini Dewan telah mengesahkan 8 RUU, baik RUU Prioritas Prolegnas maupun RUU Kumulatif Terbuka. DPR telah menyelesaikan RUU tentang Kesehatan Jiwa. Undang-undang tentang Kesehatan Jiwa dimaksudkan untuk menjamin setiap orang dapat mencapai kualitas hidup yang baik, menikmati kehidupan kejiwaan yang sehat, bebas dari ketakutan, tekanan, dan gangguan lain yang dapat mengganggu kesehatan jiwa. Dengan Undang-undang ini dimaksudkan juga untuk menjamin setiap orang dapat mengembangkan potensi kecerdasan, memberikan perlindungan dan menjamin pelayanan kesehatan jiwa bagi Orang Dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) dan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) berdasarkan hak azasi manusia; memberikan pelayanan kesehatan secara terintegrasi, komprehensif dan berkesinambungan melalui upaya promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif.

DPR juga telah menyetujui RUU tentang Pembentukan Daerah Otonom Baru (DOB) untuk disahkan menjadi UU, yaitu pembentukan Kabupaten Muna Barat, Kabupaten Buton Tengah dan Kabupaten Buton Selatan di Provinsi Sulawesi Tenggara. Dewan berharap, pembentukan daerah otonomi baru ini harus benar-benar dapat dioperasionalkan dan dikawal dengan baik, dapat mendorong peningkatan pelayanan dalam bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan dan dapat memberikan kemampuan daerah dalam pemanfaatan potensi di daerahnya.

RUU tentang Pengesahan Perjanjian Ekstradisi antara Republik Indonesia dengan Republik India juga telah disahkan oleh DPR RI. Dengan adanya perjanjian Ekstradisi ini, De-



wan berharap kedua negara dapat saling mendukung dalam penegakan hukum dan pemberantasan kejahatan, terutama yang berkaitan dengan kejahatan lintas negara (transnational crime). RUU tentang Pengesahan Persetujuan tentang Kerja Sama Industri Pertahanan Antara Pemerintah RI dan Pemerintah Republik Turki juga telah disetujui. Bagian-bagian penting dalam persetujuan tentang kerja sama industri pertahanan antara Pemerintah RI dan Pemerintah Turki antara lain, pembentukan komite bersama dalam industri pertahanan; dan kewajiban untuk saling melindungi hak kekayaan intelektual, informasi, dokumen dan bahan-bahan yang bersifat rahasia, dan adanya komitmen para pihak untuk mengedepankan keamanan dan integritas masing-masing negara.

Beberapa RUU inisiatif AKD DPR, disetujui menjadi RUU inisiatif DPR, yaitu RUU tentang Larangan Minuman Beralkohol, RUU tentang Sistem Perbukuan, RUU tentang Kebudayaan, RUU tentang Perkebunan, RUU tentang Pertembakauan, RUU tentang Pengelolaan Ibadah Haji dan Umroh, RUU tentang Konservasi Tanah dan Air, dan RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Dewan juga menyoroti keluarnya Putusan MK yang membatalkan UU No. 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian. Selain membatalkan UU No. 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian, MK juga memutuskan UU Perkoperasian yang lama yaitu UU No. 25 Tahun 1992 kembali berlaku sebagai acuan dasar hukum yang diikuti oleh seluruh gerakan koperasi di seluruh Indonesia.

Selain itu, Dewan juga berupaya agar revisi atas UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan RUU ten-



tang Pemilihan Kepala Daerah dapat segera diselesaikan menyusul UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Rapat Paripurna Tanggal 8 Juli tentang persetujuan pengesahan atas RUU tentang perubahan UU No. 27 tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD.

Ketua Pansus menyampaikan dalam Rapat paripurna tanggal 8 Juli, beberapa hal penting dalam RUU ini, bahwa [1] pada saat dilakukan pembahasan, Panitia Khusus melakukan kegiatan yang cukup tinggi dengan mengundang beberapa pemangku kepentingan, pakar, akademisi, LSM, dan berbagai asosiasi, untuk memberikan masukan terhadap perubahan atas UU MD3. Nama UU yang semula adalah UU tentang perubahan UU No. 27 tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD, menjadi UU baru sebagai pengganti UU No. 27 tahun 2009. Keputusan menjadi UU baru tersebut, menurut Ketua Pansus, sudah sesuai dengan ketentuan UU No. 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

[2] Visi utama RUU tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD adalah terwujudnya parlemen yang produktif, efektif dan akuntabel. Produktif dalam menjalankan fungsi-fungsi utama, berorientasi kepada kepentingan rakyat bersama Pemerintah melalui mekanisme checks and ballances dalam kerangka sistem pemerintahan presidensiil. Serta dilandasi prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, berwibawa, berintegritas dan bermartabat dalam koridor konstitusi.



Suasana Rapat Pengambilan Keputusan RUU tentang MD3

[3] Pansus berpandangan bahwa penguatan hak-hak konstitusional rakyat yang dijalankan DPR dalam sistem pemerintahan presidensiil hanya dapat diwujudkan melalui penguatan sistem pendukung yang memiliki keahlian teknis dan seharusnya bersifat otonom di bawah DPR. Dengan demikian, DPR lebih dititik beratkan pada kerja politik, sementara kerja teknis dilakukan oleh sekretariat jenderal. Namun usulan ini belum mendapatkan persetujuan pemerintah, karena pemerintah belum menyetujui Kesekjenan DPR dipisahkan dari eksekutif dan otonom dibawah DPR.

[4] Atas dasar visi tersebut, inti substansi baru dalam UU ini adalah penataan, restrukturisasi, remodifikasi, kelembagaan, dan pelaksanaan hak-hak, tugas dan wewenang MPR, DPR, DPD dan DPRD, juga untuk memperkuat dan memperjelas beberapa substansi, berkaitan dengan penguatan peran komisi sebagai ujung tombak pelaksanaan tiga fungsi DPR; penguatan peran Badan Kehormatan DPR yang berubah menjadi Mahkamah Kehormatan DPR yang bertugas menjaga integritas dan kewibawaan anggota DPR dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya.

[5] Penataan tugas dan fungsi Badan Legislasi, Badan Anggaran, dan penyempurnaan mekanisme pembentukan UU, terkait dengan putusan MK. [6] Penyempurnaan mekanisme pelaksanaan hak-hak Dewan, seperti hak angket, interpelasi dan menyatakan pendapat. [7] Penguatan sistem pendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPR melalui penegasan terhadap pembentukan Badan Keahlian DPR.

Pansus juga memandang perlu memperkuat demokratisasi internal dewan untuk menjamin transparansi dan akuntabilitas dewan dalam berbagai aspek, antara lain dalam proses pembahasan RUU, pembahasan RAPBN, sistem pemilihan AKD. Disamping prinsip demokrasi, UU baru ini juga menegaskan prinsip kesamaan kedudukan warga negara di depan hukum dan pemerintahan, sehingga penyidikan terhadap anggota MPR, DPR, DPD dan DPRD, tidak memerlukan ijin Presiden. Dalam RUU ini juga diatur mengenai penguatan peran MPR dengan menetapkan beberapa tugas MPR antara lain memasyarakatkan ketetapan MPR, Pancasila, UUD NRI tahun 1945, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika, serta mengkaji sistem ketatanegaraan UUD NRI tahun 1945 serta pelaksanaannya. Dan menyerap aspirasi masyarakat, berkaitan dengan UUD NRI tahun 1945.

Penguatan DPD juga diatur lebih jelas dalam UU ini, terutama menyangkut pelaksanaan fungsi legislasi DPD, mulai dari penyusunan program legislasi nasional sampai dengan pembahasan RUU.

Khusus untuk DPRD provinsi dan kabupaten/kota, Pansus berpandangan, perubahan pada lembaga MPR, DPR dan DPD, tidak harus diikuti dengan perubahan yang sama pada DPRD. Oleh karena itu, Pansus tidak melakukan perubahan-perubahan mendasar pada lembaga perwakilan daerah provinsi, kabupaten/kota.

Ketua pansus melaporkan, bahwa pansus telah berusaha sekuat tenaga dan fikiran untuk menyelesaikan pembahasan terhadap RUU ini, namun masih terdapat beberapa materi yang perlu diselesaikan dalam pembicaraan tingkat II di Rapat Paripurna, yaitu mengenai mekanisme pemilihan pimpinan DPR dan AKD-nya, yang tertuang dalam pasal-pasal 84, 97, 104, 109, 115 dan 121.

Setelah melalui pembahasan dalam rapat paripurna dengan diwarnai oleh berbagai interupsi, RUU ini akhirnya mendapat persetujuan secara aklamasi dalam rapat paripurna tanggal 8 Juli 2014. ***

Bali Perlu Perhatian Khusus Ketersediaan Energi

DPR menilai Provinsi Bali perlu mendapat perhatian khusus, terutama dalam ketersediaan energi. Untuk itu, DPR akan berupaya melakukan pengembangan sektor energi kelistrikan melalui riset dan teknologi salah satunya dengan mendorong munculnya lebih banyak energi terbarukan di Provinsi Bali sebagai upaya mewujudkan kemandirian listrik di Pulau Dewata.

Hal itu disampaikan Ketua Komisi VII DPR Milton Pakpahan kepada wartawan saat memimpin rombongan Komisi VII melakukan kunjungan kerja di Provinsi Bali, Senin (14/7).

Pernyataan politisi Partai Demokrat itu menyusul sempat terjadinya listrik padam total (*blackout*) yang melanda Provinsi Bali beberapa hari lalu, akibat cuaca buruk.

“Sebagai destinasi wisata utama, kejadian yang menyebabkan Bali gelap gulita tersebut seharusnya dapat diantisipasi,” katanya.

Menurut Milton, secara nasional rasio elektrifikasi sudah cukup bagus yaitu mencapai 81,51 persen. Demikian juga dengan Bali sudah cukup bagus yaitu rasionya mencapai 79,28 persen. Namun, masih perlu terus didorong munculnya lebih banyak energi terbarukan untuk mewujudkan kemandirian listrik Provinsi Bali.

Menanggapi hal itu, Wakil Gubernur Provinsi Bali Ketut Sudikerta mengapresiasi niat dari Komisi VII DPR tersebut. Menurut dia, mengenai kelistrikan, hingga saat ini pasokan listrik untuk Provinsi Bali mencapai 794,752 kwh dengan cadangan 19,8 MW.

Dari jumlah tersebut, kata Ketut, sebagian memang masih dipasok dari Pulau Jawa, sehingga bila ada gangguan suplai, kejadian *blackout* tidak dapat dihindari.



Ketua Tim Kunker Komisi VII DPR Milton Pakpahan dan Wakil Gubernur Bali

“Bagi kami, listrik merupakan kebutuhan vital yang harus dijaga ketersediaannya. Untuk itu, Pemprov Bali terus berupaya mencari terobosan untuk menciptakan sumber energi terbarukan. Sumber yang mulai digarap di antaranya energi matahari, angin dan juga dari pengolahan sampah,” jelasnya.

Untuk mengoptimalkan pengembangan tersebut, Ketut sangat berharap sumber pendanaan dari pemerintahan pusat.

Di sisi lain, dalam kesempatan itu Ketut kembali menitikpkan aspirasi agar Provinsi Bali mendapat dana perimbangan yang lebih besar dari sektor pariwisata. Untuk itu, dia berharap ada revisi UU yang mengatur regulasi keuangan negara.

“Karena dalam UU tersebut dana perimbangan hanya terkait dengan sumber daya alam, sementara kami mengandalkan sektor jasa yang menyumbang devisa sekitar Rp 40 triliun,” ujarnya. Pihaknya berharap peraturan

tersebut nantinya mengedepankan semangat keadilan dan pemerataan.

Di tempat yang sama, Anggota Komisi VII DPR Sutan Bhatogana mengatakan Provinsi Bali bukan hanya menjadi jendela Indonesia, namun sudah menjadi jendela dunia. “Apa yang terjadi di Bali akan menjadi perhatian dan sorotan dunia,” ujarnya.

Karena itu, dia sepakat dengan Pimpinan Komisi VII DPR kalau Provinsi Bali perlu mendapat perhatian khusus, terutama dalam ketersediaan energi. Bahkan dia mengajukan ide agar Provinsi Bali bisa menjadi proyek percontohan pengembangan bahan bakar nabati.

“Selain ramah lingkungan, proyek ini nantinya juga bisa mempercantik alam Bali. Misalnya, kita kembangkan sumber energi nabati dari biji bunga matahari. Jika diseriusi, ide ini sangat mungkin untuk dikembangkan,” katanya.

Kunjungan Komisi VII DPR ke Provinsi Bali dalam rangka kunjungan kerja

pada masa reses persidangan. Selain Ketua Komisi VII DPR Milton Pakpahan sebagai Ketua Tim Rombongan, hadir pula sejumlah Anggota Komisi VII DPR yang ikut dalam kunjungan kerja dian-

taranya, dari F-PD Asfihani, Siti Romlah, Teuku Irwan, Sutan Bhatoegana, dari F-PG Dito Ganinduto, Bobby Adhityo Rizaldi, Halim Kalla, dari F-PDI Perjuangan Nazaruddin Kiemas, Bambang

Wuryanto, Dewi Aryani Hilman, dari F-PAN Jamaluddin Jafar dan Totok Daryanto, Mulyadi (F-Gerindra) dan Herry Lontung Siregar (F-Hanura). (nt)
foto: nita/parole/hr

Badan POM Perlu Lebih Bernyali



Tim Kunker Komisi IX DPR usai pertemuan dengan jajaran Pimpinan BP POM Medan dan BKKBN

Sejumlah produk makanan mengandung bahan berbahaya seperti formalin, borax, pewarna *rhodamin-b* dan *metanil yellow* saat ini dikonsumsi masyarakat tanpa mereka menyadarinya. Badan Pengawasan Obat dan Makanan (POM) diminta lebih proaktif mengawasi dan memberikan perlindungan kepada masyarakat.

“Badan POM perlu punya nyali, kalau tidak makanan mengandung borax, formalin akan semakin membahayakan masyarakat. Saya mendapat laporan peredarannya cukup besar di sini, perlu lebih proaktif, awasi diam-diam berpakaian preman,” kata anggota Tim Kunjungan Kerja (Kunker) Komisi IX DPR RI Anshory Siregar dalam pertemuan dengan jajaran Pimpinan BP POM Medan, Sumatera Utara, Senin (14/7).

Ia menyebut pengalamannya ketika berkunjung ke satu negara di Eropa dan menyaksikan sendiri bagaimana kete-

gasan petugas Badan POM setempat yang memberi sanksi restoran yang terbukti menjual makanan mengandung bahan berbahaya. Peran BP POM menurutnya juga diperlukan untuk menghadang impor produk makanan tidak layak.

“Banyak buah yang tidak layak karena disimpan sekian lama dalam freezer tapi dipaksakan masuk ke Indonesia dari sejumlah pelabuhan kecil. Dalam kasus tertentu petugas BP POM kalau perlu menggunakan senjata api untuk menegakkan aturan,” tandasnya.

Bicara pada kesempatan yang sama, anggota Tim Kunker dari F-PPP Okky Asokawati mengaku menerima masukan betapa rentannya anak-anak sekolah dari jajanan yang diduga mengandung bahan berbahaya. Negara menurutnya perlu melakukan sesuatu untuk melindungi warganya.

“Kasus jajanan berbahaya di sekolah ini terjadi di banyak daerah. Menurut saya perlu mekanisme pendataan kantin di sekolah, ada sistem yang dapat melakukan kontrol secara berkala. Negara ini-kan harus melindungi masyarakat dalam hal ini BP POM,” paparnya.

Dalam penjelasannya Kepala BP POM Medan M. Ali Bata Harahap mengatakan, sejauh ini masih terdapat kendala dalam melaksanakan tugas diantaranya keterbatasan SDM, anggaran operasional. Pembinaan terhadap sarana produksi Industri Rumah Tangga Pangan dan sejumlah kantin di sekolah sudah dilakukan tetapi belum optimal.

“Apabila ada pedagang menjual makanan mengandung zat berbahaya kita lakukan pembinaan, peringatan tertulis dan apabila masih melanggar akan dilanjutkan untuk diproses secara hukum, *pro justitia*,” kata dia. (iky) foto: ical/parole.

DPR Dorong Pemerintah Terus Kembangkan Energi Baru & Terbarukan

DPR mendorong upaya pemerintah dalam rangka percepatan pemanfaatan energi baru dan terbarukan seperti halnya Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Karangasem, di Provinsi Bali, sebagai salah satu pilot project dalam pemanfaatan energi terbarukan dengan kapasitas daya 1 MWp.

Hal itu disampaikan Ketua Komisi VII DPR, Milton Pakpahan kepada Parlemen, saat meninjau PLTS Karangasem, di Bali, Selasa (15/7).

Seperti diketahui, Komisi VII DPR melakukan kunjungan kerja di Provinsi Bali pada masa reses persidangan. PLTS Karangasem merupakan salah satu tempat yang dikunjungi Komisi VII DPR.

Kunjungan kerja yang dipimpin langsung oleh Ketua Komisi VII DPR Milton Pakpahan itu juga diikuti sejumlah Anggota Komisi VII DPR lainnya, diantaranya, Asfihani (FPD), Siti Romlah (FPD), Teuku Irwan (FPD), Sutan Bhatoegana (FPD), Dito Ganinduto (FPG), Bobby Adhityo Rizaldi (FPG), Halim Kalla (FPG), Nazarudin Kiemas (FPDIP), Bambang Wuryanto (FPDIP),

Jamaluddin Jafar (FPAN), Totok Daryanto (FPAN), Mulyadi (F-Gerindra) dan Herry Lontung Siregar (F-Hanura).

“PLTS Karangasem ini adalah salah satu *pilot project* dalam kapasitas pemanfaatan energi terbarukan. Berapa tahun ini kita (DPR-red) terus mendorong pemerintah dalam rangka percepatan pemanfaatan energi baru dan terbarukan, yang tersebar di seluruh Indonesia dan di Karangasem ini adalah yang paling besar,” kata Milton.

Menurut politisi dari Partai Demokrat, pemanfaatan energi matahari ini murah, gratis, tinggal dipakai serta mampu dimanfaatkan untuk listrik. “Ini kan energi bersih, yang menjadi persoalan kan setelah ini dibangun oleh dana APBN, nanti pengelolaan pemeliharaan yang menjadi masalah, karena ini memerlukan suku cadang pemeliharaan kebersihannya,” ujarnya.

Terkait harga, Milton menjelaskan listrik yang dihasilkan dari matahari nantinya dijual untuk masuk ke dalam jaringan PLN. “Nah di jaringan PLN itu kan ada meteran, kita harus patok harganya berapa untuk PLN membayar ke PLTS ini, untuk pemeliharannya, karyawannya dan untuk pengembalian investasinya,” katanya.

Oleh karena itu, pihaknya mendesak pemerintah untuk segera memberlakukan atau mengeluarkan aturan tentang harga 1 kwh dari pembangkit jenis PLTS ini.

“Kalau itu sudah diberlakukan dan ditambah dengan melihat situasi spesifikasi daerahnya, jadi ada angka indeks plus yang akan diberlakukan,” jelasnya.



Tim Kunker Komisi VII DPR dipimpin Ketua Komisi Milton Pakpahan meninjau PLTS Karangasem

Terkait penyerahan aset PLTS, Milton mengatakan bahwa PLTS masih dikelola oleh APBN. “Jadi barang ini (PLTS-red) milik negara, tapi nanti kita minta agar penyerahan aset ini dipercepat,” ujarnya. Milton mengatakan Komisi VII DPR akan berbicara kepada pemerintah agar PLTS ini segera diberikan kepada pemerintah daerah (Pemda) sehingga semua Pemda merasa memiliki dan merasa bertanggung-jawab.

“Kalau merasa bertanggung jawab kan Pemda akan memelihara dan mengembangkan, sehingga setiap daerah memiliki kemampuan kemandirian untuk mensuplai listrik yang selama ini tergantung dari PLN,” katanya. (nt) foto: nita/parle

DPR Pacu Kelistrikan NTB Capai Rasio Elektrifikasi Tinggi



Ketua Tim Kunker Komisi VII Daryatmo Mardiyanto saat berdialog dengan PLN Wilayah NTB

Tim Kunjungan kerja Komisi VII DPR RI ke Provinsi Nusa Tenggara Barat dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi VII Daryatmo Mardiyanto melakukan pertemuan dengan PT PLN

(persero) wilayah NTB, Selasa (15/7) di Kota Mataram NTB. Dalam menjalankan fungsi pengawasan ini tim Kunker menyoroti rasio elektrifikasi NTB yang terendah di Indonesia yaitu 60%, ditambah dengan masih adanya pemadaman listrik yang sering terjadi.

“Bahwa sekarang ini pada saat kondisi beban puncak sudah melebihi kemampuannya maka pada akhir akhir ini ada beberapa wilayah yang mengharuskan pelaku bisnis pada jam jam tertentu harus memakai genset. Jadi ada satu titik di suatu waktu dimana beban puncak nya menjadi minus” ungkap Daryatmo

General Manager PLN wilayah NTB Andi Lakipadadah menjelaskan Nusa Tenggara Barat mempunyai dua pulau besar yaitu Pulau Lombok dan Pulau Sumbawa yang tidak mungkin memperoleh listrik dari tempat lain, dimana sebagai perbandingan Pulau Bali mendapatkan semua listriknya dari Pulau Jawa yang disambung melewati kabel bawah laut.

Dengan jumlah penduduk tiga juta di Lombok dan satu



juta di Sumbawa serta keadaan bahwa sumber listrik menggunakan potensi daerah sendiri, DPR mengharap pengecekan dan pengukuran kebutuhan dan ketersediaan listrik.

“Dari hal tersebut kita disini bisa mengecek dan memonitor dua pulau terbesar tersebut yang menurut kami memudahkan melakukan pengecekan ukuran sejauh mana elektrifikasi berjalan,” kata Daryatmo.

Lebih lanjut hal ini berpengaruh pada perencanaan jangka panjang untuk pelistrikan model daerah kepulauan.

“Inilah yang menjadi contoh untuk memacu bagaimana pulau yang terpisah pisah ini terpenuhi kebutuhan listriknya dan memperoleh target khusus untuk mencapai rasio elek-

trifikasi yang tinggi” pungkasnya.

Sementara itu anggota Tim Kunker yang berasal dari Dapil setempat Rachmat Hidayat meminta agar sejumlah daerah yang kurang kondusif pasca terjadi kerusakan agar mendapat prioritas khusus.

“Bila memang harus ada pemadaman, janganlah daerah pinggiran yang masih belum kondusif itu turut mengalami pemadaman. Karena ini menyangkut keamanan dan rasa nyaman itu sendiri. Janganlah menambah suasana mencekam pada masyarakat di sana,” ujar Rachmat.

Masukan ini dilatarbelakangi peristiwa pada salah satu wilayah di Provinsi NTB yaitu Kabupaten Bima yang mengalami kerusakan beberapa waktu lalu. (ray) foto: rizka/parle

RPH Lombok Harus Terus Dibenahi

Masih banyak yang harus dibenahi dari RPH (rumah pemotongan hewan) yang ada di Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB) ini. Diantaranya Standart Operasional Prosedur (SOP) yang belum dibuat dan dijalankan sebagaimana mestinya. Hal tersebut diungkapkan Ketua Komisi IV Romahurmuziy saat mengunjungi RPH Banyumulek, Lombok Barat, Selasa (15/7).

“Selain dari SOP yang belum dijalankan sebagaimana mestinya, dalam kunjungan ini kami juga mendapati bahwa utility atau kegunaan dari segala peralatan yang sudah disediakan negara pada RPH ternyata belum digunakan sebagaimana mestinya,” ungkap Romy, begitu ia biasa disapa.

Romy mencontohkan berbagai peralatan potong yang sudah sangat modern dengan kapasitas potong hingga 60 ekor per hari, namun pada kenyataannya hanya digunakan untuk memotong 3-5 hewan ternak saja. Menurut Romy hal tersebut akan mubazir atau sia-sia.

Romy menjelaskan bahwa kunjungan Komisi IV DPR ke NTB sebagai bagian dari fungsi pengawasan dewan sejalan dengan fungsi budgeting atau anggaran yang telah dilakukannya.



Ketua Komisi IV Romahurmuziy saat meninjau RPH Banyumulek, Lombok Barat

“Sebelumnya kami telah menganggarkan dana kepada Dirjen Peternakan dalam rangka merevitalisasi RPH yang merupakan bantuan JIBIC (Japan Bank International Corporation) yang terkendala mangkrak hampir sepuluh tahun. “Alhamdulillah hari ini kami lihat jalan, walaupun dalam pelaksanaannya masih banyak kekurangan yang harus terus dibenahi,” katanya. (Ayu) foto: ayu/parle/hr

Komisi II Kunker Ke Tiga Provinsi Sumut, Kepri dan Sultra

Dalam reses Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2013-2014 Komisi II DPR RI mengirim tiga tim kunjungan kerja yaitu ke Provinsi Sumatera Utara, Provinsi Kepulauan Riau dan Provinsi Sulawesi Tenggara.

Rencana kunjungan kerja Komisi II DPR RI ke Provinsi Kepulauan Riau

dari tanggal 4 sampai 8 Agustus mendatang dan dipimpin Wakil Ketua Komisi/Ketua Tim Arif Wibowo didampingi 22 orang Anggota DPR RI, Antara lain ; Khatibul Umam Wiranu (F-PD), Salim Mengga (F-PD), Nurcahyo Anggorojati (F-PD), Abdul Gafar Patappe (F-PD), Rusminiati (F-PD), Syaiful Anwar (F-PD), Gray. Koesmoertiyah

(F-PD), Eko Sarjono Putro (F-PD), Nurul Arifin (F-PG), Taufiq Hidayat (F-PG), Azhar Romli (F-PG), Markus Nari (F-PG), Eddy Mihati (F-PDIP), Alexander Litaay ((F-PDIP), Jazuli Juwaini (F-PKS), Yandri Susanto (F-PAN). Nu'man Abdul Hakim (F-PPP), Abdul Malik Haramain (F-PKB), Mestiariny Habie (F-Gerindra), Rahman Halid (F-Hanura) dan Miryam

Haryani (F-Hanura).

Pada hari pertama Komisi II DPR mengadakan pertemuan dengan Gubernur, Pimpinan DPRD Provinsi Kepulauan Riau SKPD dan selanjutnya dengan Walikota, Pimpinan DPRD dan BKD Kota Batam terkait penyelenggaraan pemerintah daerah dan pelayanan publik diberbagai bidang, penanganan tenaga honorer dan masalah kepegawaian daerah serta arsip daerah.

Selanjutnya hari kedua, pertemuan



Wakil Ketua Komisi II DPR Arif Wibowo

dengan KPU Kota Batam dan Panwaslu Kota Batam membahas masalah Evaluasi Pelaksanaan Pileg dan Pilpres 2014 dan dilanjutkan dengan peninjauan lapangan terkait dengan masalah pelayanan publik.

Disamping itu, Komisi II DPR juga mengadakan pertemuan dengan Kakanwil BPN Provinsi dan para Kakanwil BPN Kota se-Provinsi Kepulauan Riau membahas kebijakan pertanahan dan penanganan kasus-kasus pertanahan. (hindra). foto : andri/parle/hr.

DPR Tantang Bali Bebas Buta Aksara

DPR RI menantang Provinsi Bali untuk segera menuntaskan buta aksara yang ada di daerahnya. Hal itu diungkapkan oleh Anggota Komisi X DPR Nurul Qomar saat melakukan kunjungan kerja Komisi X DPR ke Bali, Senin (14/07). Pasalnya, Provinsi Bali masih masuk dalam 10 besar daftar provinsi penyandang buta aksara.

“Menurut Badan Pusat Statistik, masih ada 8,6 juta masyarakat Indonesia yang masih buta aksara di sepuluh provinsi di Indonesia. Salah satunya adalah Provinsi Bali. Kapan Provinsi Bali mendeklarasikan tuntas buta aksara?” tanya Qomar saat sesi pertemuan dengan Wakil Gubernur Bali dan jajaran di Gedung Siswa Sabha Utama, Kantor Gubernur Bali.

Politisi Demokrat ini menilai, Bali yang telah menjadi tujuan wisata internasional, harus didukung oleh masyarakat yang bebas buta aksara. Sehingga dengan penuntasan buta aksara ini diharapkan dapat meningkatkan pariwisata dan mendatangkan wisatawan.

“Tuntas buta aksara perlu dideklarasikan, karena itu berdampak pada Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Bali. Ini tugas kita sebagai pemangku kepentingan di bidang pendidikan, untuk memberantas buta aksara. Pasalnya, setiap tahun ada sekitar 300 ribu orang berpotensi menjadi buta aksara,” jelas politisi yang menyandang predikat Duta Aksara ini.

Wakil Gubernur Bali I Ketut Sudikerta menyatakan menerima tantangan tersebut, namun tidak berani menjanjikan tahun depan. Pasalnya, anggaran untuk tahun 2015 sudah dialokasikan. Namun, setidaknya di tahun depan akan dimulai pembinaan.

“Deklarasi bebas buta aksara ini tentu sangat kami dukung, Saya ingin dipercepat, tapi sepertinya tidak mungkin di tahun 2015. Karena anggaran 2015 sudah dialokasikan untuk infrastruktur. Saya akan pastikan di tahun 2016. Tahun depan akan dimulai penanganannya, kemudian pada 2016 pasti dideklarasikan Bali Tuntas Buta Aksara,” janji Sudikerta.

Pada kesempatan yang sama, Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Provinsi Bali Tia Kusuma Wardhani mengatakan Bali belum memiliki data penyandang buta aksara secara lengkap. Pasalnya, BPS hanya memberikan data berupa persentase, namun tidak menjelaskan wilayah domisili penyandang buta aksara.

Apalagi, BPS malah menyatakan penyandang buta aksara di Bali ini berusia di atas 60 tahun. Padahal, yang menjadi konsentrasi penanganan oleh Pemprov adalah penduduk berusia 14 tahun hingga 59 tahun.

“Data yang kami dapatkan dari BPS, persentase buta aksara di Bali yang berusia lebih dari 60 tahun. Sedangkan angka harapan hidup penduduk Bali



Anggota Komisi X DPR Nurul Qomar

hanya 72 tahun. Sehingga sangat sulit, karena faktor umur. Sehingga, ketika ditanya berapa jumlah buta aksara, ini yang cukup sulit (menjawabnya). Sedangkan, garapan kami yang berusia 14 tahun sampai 59 tahun,” jelas Tia.

Dalam kesempatan kunjungan kerja Komisi X DPR ini, rombongan dipimpin Ketua Komisi X DPR Agus Hermanto. Turut dalam rombongan diantaranya Anggota Komisi X DPR Parlindungan Hutabarat, Lucy Kurniasari, Jefirstson Riwu Kore, Nurul Qomar, dan Jamal Mirdad.

Hadir pula Anggota Komisi X DPR lain, yaitu Popong Otje Djundunan, Harbiah Salahuddin, Rully Chairul Azwar, Kahar Muzakir, Wayan Koster, Asdy Narang, Rohmani, Herlini Amran, dan Nasrullah. (sf), foto : sofyan efendi/parle/hr



Komisi VIII Dorong Penertiban Perda Zakat



Ketua Tim Kunker Komisi VIII DPR Mahrus Munir bertukar cinderamata dengan Kakanwil Kementerian Agama Kalsel

Tim Komisi VIII DPR RI dalam rangkaian kunjungannya ke Kalimantan Selatan mengadakan pertemuan dengan Kakanwil Agama Provinsi Kalsel, disambut Kepala Kanwil Kemenag Kalsel, M Tambrin di. Rattan Inn Hotel, Senin (14/07).

Dalam kesempatan ini hadir pula Pemimpin Umum Banjarmasin Post Group, HG Pangeran Rusdi Effendie AR, yang juga menjabat Ketua Baznas Kalsel dan Ketua Dewan Masjid Kalsel.

“Tentunya ini silaturahmi. Sekaligus dialog mendengar bagaimana pelaksanaan program di lingkungan kemenag dan kendala apa saja yang di hadapi dalam melaksanakan program,” ujar Ketua Tim Kunker Komisi VIII DPR Mahrus Munir.

Dikatakan Mahrus, meski pertemuan ini berlangsung singkat, namun sangat bermanfaat. “Walau singkat, tapi isinya padat dan pastinya bermanfaat. Banyak catatan dan semoga berkah pertemuan ini. Perda zakat akan kami dorong agar ditertibkan. Ini permintaan Ketua Baznas Rusdi Effendi. Dengan penertiban diharapkan pemasukan zakat meningkat di Kalsel dan semoga fakir miskin berkurang,” ungkapnya.

“Kebiasaan masyarakat menyumbangkan zakatnya itu bukan kepada lembaga resmi, tapi ke masjid langsung atau ulama. Tapi kami sudah sosialisasikan, selain itu juga belum ada perda yang mengatur tentang zakat,” paparnya.

Sementara itu Kakanwil Kemenag Tambrin melaporkan soal haji dan dalam acara dialog itu terungkap panjangnya daftar tunggu di Kalsel. “ Panjang antrean , 73 ribu dengan keberangkatan 19 tahun,” ungkapnya.

Sebelumnya juga digelar acara di Kanwil Kemenag Kalsel, yakni pembukaan Bimtek Kurikulum Berwawasan Lingkungan bagi kepala MA / Mts dan Workshop Operator Sistem Informasi Manajemen Pendidikan Islam Madrasah se-Kalsel berwawasan lingkungan. (Andri), foto : andri/parle/hr.

Sekolah Tak Berizin Harus Ditindak

Ketua Komisi X DPR Agus Hermanto menegaskan, sekolah yang tidak memiliki izin harus ditindak, dan dihentikan operasionalnya. Hal ini ia ungkapkan ketika menjawab pertanyaan awak media di Bali, usai pertemuan dengan Wakil Gubernur Bali dan jajaran di Kantor Gubernur Bali, Senin (14/07). Padahal terkait sekolah tanpa izin ini tidak menjadi pembahasan pada sesi pertemuan.

“Terkait dengan perizinan, walaupun hak izin melekat pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, namun Pemerintah Daerah juga memiliki hak untuk pro aktif dalam hal ini, supaya ada penindakan lebih lanjut. Tidak boleh ada institusi pendidikan yang tidak memiliki izin,” tegas Agus.

Politisi Demokrat ini menambahkan, jika sekolah tidak memiliki izin, dan ter-

catat di Pemda, tentu saja Pemda tidak dapat melakukan kontrol. Kejadian beberapa waktu lalu, dimana ada sekolah internasional di Jakarta yang tidak memiliki izin tentu saja menjadi pelajaran. Ia berharap, hal ini tidak terjadi lagi.

“Kalau tidak memiliki izin, bagaimana pemerintah daerah dapat melakukan kontrol? Tindakan yang bisa dilakukan, sekolah tersebut tidak boleh beroperasi terlebih dahulu. Soal hal ini, harus ada kerjasama antara Pemda dengan Kemendikbud,” tambahnya.

Walaupun ia belum mendapat informasi yang lengkap tentang hal ini, ia mengaku akan menyampaikan temuan ini kepada Mendikbud M Nuh.

“Saya belum tahu persis apakah hal ini memang terjadi, tentunya perlu me-



Ketua Komisi X DPR Agus Hermanto

lalui berbagai penyelidikan. Ke depannya, temuan ini akan kami sampaikan pada rapat kerja dengan Mendikbud,”

janji Politisi asal Dapil Jawa Tengah ini.

Menilik situs web balipost.com, dijelaskan banyak sekolah yang beroperasi di Bali tidak memiliki izin operasional dari Kemendikbud, namun sudah melaksanakan proses pembelajaran dan beroperasi bertahun-tahun.

Dari pemantauan di lapangan, ban-

yak ditemukan sekolah internasional yang beroperasi di Bali tidak berizin dari Kemendikbud. Menyikapi kondisi ini, Gubernur sudah bersurat ke Mendikbud, termasuk agar ada pelibatan pemerintah provinsi dalam proses penerbitan izin hingga pengawasan sekolah internasional yang beroperasi di Bali,” kata Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Provinsi Bali TIA

(Tjok Istri Agung) Kusuma Wardhani.

Disdikpora Bali berharap sekolah internasional di Bali yang belum berizin itu agar segera melengkapi izinya dan terus berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten/kota setempat serta Pemprov Bali. (sf), foto : sofyane fendil/parle/hr.

Mekanisme Pasar Sebabkan Perbedaan Harga Daging Antar Wilayah

Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Ibnu Multazam terkejut dengan harga daging potong di wilayah Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB) yang sama dengan harga di DKI Jakarta. Padahal harga daging potong di pasaran Sumbawa yang notabene wilayahnya berdekatan dengan Lombok jauh lebih rendah.

“Menjelang Idul fitri, kami juga ingin mengetahui sejauh mana pasokan daging di NTB serta harga di pasaran bagaimana. Sayangnya saya malah mendapat informasi kalau harga di Lombok jauh lebih tinggi di banding dengan Sumbawa. Padahal wilayah ini berdekatan,” ungkap Ibnu.

Politisi dari Fraksi PKB ini menduga perbedaan harga yang mencolok itu semata hanya dikarenakan mekanisme pasar. Dimana permintaan atau demand daging di wilayah Lombok lebih tinggi dibanding Sumbawa, sedangkan supply daging potong di daerah ini masih sangat minim. Sementara hal sebaliknya terjadi di Sumbawa.

Meski demikian, ditambahkan Ketua Komisi IV Romahurmuziy di saat-saat menjelang Idul Fitri dimana kebutuhan daging meningkat, maka hal tersebut menjadi suatu yang serius.



Wakil Ketua Komisi IV DPR Ibnu Multazam saat meninjau RPH Banyumulek

Oleh karenanya secepat mungkin pihaknya akan meminta pihak-pihak terkait untuk segera membuat *leveling* (tingkatan) harga daging, agar harga di pasaran tidak jomplang.

Hal tersebut juga diamini oleh Tim Kunker Komisi IV lainnya seperti Darizal Basir, Suparman, Ambar Tjahjono, Akbar Zulfakar, Anton Sihombing, I Gusti Ketut Adhiputra, Zainut Tauhid, dan Anak Agung Sanjaya. (Ayu)foto: ayu/parle/hr

Kurangnya Sosialisasi Sebabkan RPH Sepi Peminat

Komisi IV DPR RI dalam kunjungannya ke rumah pemotongan hewan (RPH) Banyumulek, Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat (NTB) menemukan adanya penggunaan atau *utility* yang kurang maksimal. Dari 60 kapasitas pemotongan per hari, RPH tersebut baru melayani pemotongan 3-5 ekor per hari.

Hal tersebut dikarenakan harga pemotongan hewan di RPH lebih mahal hingga tiga kali lipat di banding harga pemotongan di TPH (tempat pemotongan hewan) tradisional. Sementara ketersediaan hewan ternak



Anggota Komisi IV DPR Zainut Tauhid

di RPH tersebut masih sangat minim. Oleh karena itu, RPH tersebut menggandeng PT GNE sebagai mitra kerja yang menyediakan hewan potong.

Meski demikian menurut Anggota Komisi IV DPR, Zainut Tauhid, tetap harus ada sosialisasi atau rangsangan lain agar para pedagang atau peternak lebih memilih memotong hewannya di RPH.

“Kenapa orang lebih suka dengan pemotongan yang tradisional? Ya karena masih kurangnya sosialisasi tentang keunggulan memotong di RPH. Kurangnya sosialisasi tentang ke higienisan memotong di RPH. Selain tentunya harga atau biaya potong yang seharusnya bisa diturunkan,” papar Zainut. (Ayu) foto: ayu/parle/hr



Komisi VII Pertanyakan Belum Diserahkannya Aset PLTS ke Pemprov Bali

Komisi VII DPR akan meminta klarifikasi pemerintah terkait belum adanya penyerahan aset Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) di Bali dari pemerintah pusat ke pemerintah Provinsi Bali.

Hal itu disampaikan Anggota Komisi VII DPR dari Fraksi Partai Demokrat Asfihani kepada Parlemen, di Bali, Selasa (15/7) usai melakukan pertemuan dengan Wakil Gubernur Bali Ketut Sudikerta beserta jajarannya.

“Kita (Komisi VII DPR-red) akan meminta klarifikasi pemerintah dalam hal ini Kementerian ESDM yang bertanggung jawab terhadap masalah PLTS, supaya sesegera mungkin menindaklanjuti berkaitan dengan masalah aset itu,” kata Asfihani.

Politisi dari Partai Demokrat itu memastikan akan menindaklanjuti aspirasi dari Pemprov setempat yang menginginkan segera penyerahan aset PLTS itu secepat mungkin direalisasikan. “Karena kalau aset tersebut belum diserahkan, tidak akan terpelihara dan akan menjadi besi tua, sedangkan itu kan aset negara yang sangat berpotensi membantu pemerintah daerah, khususnya bagaimana elektrifikasi listrik daerah Bali ini bisa terbantu,” ujarnya.

Hal senada juga disampaikan Anggota Komisi VII DPR dari Fraksi Partai Golkar (FPG) Bobby Adithya Rizaldi. Menurut Bobby, belum diserahkan aset PLTS Bali ke Pemprov akan merugikan semua pihak. “Kalau ini tidak segera dilepas, tahun 2015 tidak dianggarkan *maintenance* nya maka ini akan rusak semua,” kata Bobby.

Meski begitu, menurut Bobby, permasalahan belum diserahkan aset PLTS bukan hanya di Bali saja, di beberapa tempat juga mengalami hal yang sama. Sebab, prosedur pelepasan aset itu melalui institusi kementerian.

“Prosedurnya pelepasan aset itu dari Kementerian ESDM ke Kementerian Keuangan melalui Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DKJN). Mereka selalu ada kekhawatiran di kriminalisasi kebijakan, jadi mereka menunggu opini dari institusi lain yang sebenarnya tidak perlu,” ujarnya.



Anggota Tim Kunker Komisi VII DPR Bobby Adithya Rizaldi dan Asfihani saat berdialog dengan jajaran Pemprov. Bali

Bobby beranggapan, pemerintah pusat terlalu hati-hati dalam proses penyerahan aset PLTS. Karena khawatir di kemudian hari kebijakan penyerahan aset tersebut bisa dikriminalisasi karena dianggap merugikan keuangan negara.

“Mereka (pemerintah-red) terlalu khawatir menganggap definisi kerugian negara sangat luas. Padahal ini kan bukan pelepasan dari BUMN, ini pelepasan antara institusi Kementerian. Akhirnya masing-masing terlalu hati-hati akhirnya tidak ada keputusan. Makanya kita akan dorong penyerahan aset ini biar cepat keputusannya,” kata Bobby.

Seperti diketahui, Komisi VII DPR melakukan kunjungan kerja di Provinsi Bali pada masa reses persidangan. Kunjungan kerja yang dipimpin langsung oleh Ketua Komisi VII DPR Milton Pakpahan itu juga dihadiri sejumlah Anggota Komisi VII DPR lainnya, diantaranya, Siti Romlah (FPD), Teuku Irwan (FPD), Sutan Bhatoegana (FPD), Dito Ganinduto (FPG), Bobby Adhityo Rizaldi (FPG), Halim Kalla (FPG), Nazaruddin Kiemas (FPDIP), Bambang Wuryanto (FPDIP),

Dewi Aryani Hilman (FPDIP), Jamaluddin Jafar (FPAN), Totok Daryanto (FPAN), Mulyadi (F-Gerindra) dan Herry Lontung Siregar (F-Hanura). (nt) foto: nita/parle/hr

Komisi IV Harap Setiap Hewan Potong Diberikan Kartu Identitas

Ketua Komisi IV DPR RI Romahurmuziy berharap Dirjen Peternakan dapat memberikan kartu identitas semacam chips pada hewan potong.

“Penggunaan chip sangat diperlukan untuk menelusuri asal hewan dari RPH (rumah pemotongan hewan) yang mana jika terjadi kasus penularan penyakit dari hewan,

sehingga dapat segera diketahui penyebabnya,” kata Romy saat mengunjungi RPH Banyumulek, Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB), Selasa (15/7)

Dijelaskannya, hewan potong yang sudah memiliki chip jika telah dipotong hingga bagian terkecilpun tetap akan diketahui identitas hewan tersebut baik nama, berat, jenis,



pemilik serta asal RPH yang memotongnya.

Hal tersebut menurut Romy telah dilakukan negara-negara maju, karena menjadi bagian dari *standard animal welfare* yang tengah disosialisasikan organisasi pecinta binatang dunia.

Berdasarkan laporan dari Dirjen Peternakan, di NTB sendiri ada sekitar 54 RPH, namun hanya tiga RPH yang berstandard internasional dan bersertifikat. (Ayu) foto: ayu/parle

Komisi IV DPR saat dialog di RPH Banyumulek

Banyak Potensi di Sultra Belum Tergali

Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) memiliki 14 kabupaten/kota dengan jumlah penduduk 2,7 juta jiwa. Banyak sektor belum tergali secara optimal di provinsi yang juga dikenal dengan bumi anoa ini. Dari pariwisata, pendidikan, olahraga, hingga pertanian, butuh perhatian pemerintah pusat.

Inilah yang terlihat dari hasil kunjungan kerja (kunker) Komisi X DPR RI ke Kendari, Sultra, Senin (14/7). Tim kunker dipimpin Wakil Ketua Komisi X Utut Adianto dan diterima Sekda Sultra Lukman Abunawas di Kantor Gubernur Sultra. Anggota Komisi X yang turut serta adalah Rinto Subekti (F-PD), Sri Novida (F-PD), Anton Sukartono (F-PD), Ferdiansyah (F-PG), Zulfadhli (F-PG), Ahmad Zainuddin (F-PKS), Surahman Hidayat (F-PKS), dan Budi Heryadi (F-Gerindra).

Dalam pertemuan tersebut hadir semua unsur Muspida Sultra. Di bidang Pariwisata, Sultra punya banyak destinasi pariwisata menarik seperti wisata bawah laut Wakatobi yang belum terpublikasi secara luas. Wisata ini masih kalah dengan wisata bawah laut Bunaken (Sulut), Raja Ampat (Papua), dan Bali. Dinas Pariwisata Sultra, sedang mengencangkan promosi Wakatobi sebagai wisata bawah laut alternatif di Nusantara selain di Papua, Sulut, dan Bali.

Di bidang olahraga, Sultra sangat terkenal dengan olahraga dayung. Para atlet dayung Sultra selalu menyumbangkan emas bagi kontingen Indonesia di pesta olahraga Sea Games dan Asian Games. Namun, perhatian terhadap kesejahteraan para atlet



Tukar menukar cinderamata Wakil Ketua Komisi X DPR Utut Adianto dengan Pemprov Sultra

dayung sangat kurang. Selama ini, belum ada asrama yang representatif bagi para pedayung di Sultra. Bahkan, keterangan dari Dinas Pemuda dan Olahraga Sultra, para pedayung sudah kehilangan kuota untuk diangkat jadi PNS.

Sekda Sultra juga mengungkapkan, saat ini Sultra akan membangun stadion besar di atas lahan 50 hektar sekaligus dengan kompleks olahraganya, seperti sarana latihan dan asrama atlet. Proposal pembangunannya segera diajukan ke Komisi X DPR dan Kemenpora. Dengan stadion ini, para atlet di Sultra diharapkan semakin berprestasi karena mendapat perhatian pemerintah.

Sementara itu, di bidang pendidikan, Sultra memiliki 2.029 unit PAUD, seki-

tar 2.000 unit SD, 700 lebih unit SMP, dan 265 unit SMA. Sultra juga memiliki 2 universitas negeri. Dan kelak akan memiliki lagi 2 kampus negeri. Yang menjadi persoalan di Sultra, regulasi sertifikasi guru masih menyisakan masalah. Para guru dituntut mengejar jam mengajar sebagai syarat mendapat sertifikasi guru. Akhirnya, banyak guru mengajar di beberapa sekolah untuk memenuhi syarat tersebut.

Selain itu, Kepala Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan, Sultra, menilai, pelatihan guru lewat pra jabatan selama ini belum penuh syarat pedagogik. Dampaknya, rekrutmen guru tersebut menurunkan kualitas pendidikan di Sultra. Semua persolan di berbagai sektor ini harus menjadi perhatian pemerintah pusat dan juga Komisi X DPR. (mh), foto: m. husein/parle/hr.

Rata-rata Wisatawan Menetap Dua Hari di Sultra

Para wisatawan yang berkunjung ke Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) rata-rata hanya menetap selama 2 hari. Padahal, target Dinas Pariwisata Sultra mengharapkan para wisatawan bisa menetap selama 4 hari.

Demikian terungkap dalam pertemuan Komisi X DPR RI dengan jajaran Pemprov Sultra, di Kendari, Senin (14/7). Anggota Komisi X DPR Ferdiansyah (F-PG) berharap, justru mestinya para wisatawan itu bisa menetap selama 5 hari. Itu target yang ideal. Untuk itulah, promosi pariwisata di Sultra harus dilakukan secara masif.

Para wisatawan, kata Ferdiansyah, harus mudah mendapatkan informasi dan agenda pariwisata di Sultra. Dengan begitu, angka kunjungan wisatawan semakin tinggi dan bisa menetap setidaknya selama 5 hari. Sultra sebetulnya memiliki destinasi wisata yang menarik. Salah satunya yang paling difavoritkan adalah wisata laut di Wakatobi. Destinasi wisata yang satu ini bisa menjadi alternatif selain wisata laut di Bali dan Raja Ampat.

Kepala Dinas Pariwisata setempat menyatakan, promosi dan pameran sudah sering dilakukan, tidak saja di dalam negeri, tapi juga di luar negeri. Selain Wakatobi, Sultra punya banyak wisata sejarah. Banyak situs purbakala di Kabupaten Buton. Di kabupaten Muna misalnya, ada situs layanan tertua yang terbuat dari kulit ubi. Ini belum terpromosikan dengan baik.



Anggota Komisi X DPR Ferdiansyah

Ferdiansyah berharap, agenda pariwisata setiap hari harus ada. Sehingga wisatawan tidak buru-buru pergi meninggalkan Sultra. Di Sultra ada hewan endemik khas Sulawesi seperti anoa dan burung maleo. Ada keraton peninggalan Kesultanan Buton, dan lain-lain. Pendapatan dari pariwisata harus mampu menambah pendapatan daerah. (mh), foto: m. husein/parle/hr.

Komisi VIII Apresiasi Kalsel Terbitkan Perda Perlindungan Anak



Tim Kunker Komisi VIII DPR meninjau Kantor BBPPKS Banjarmasin

Komisi VIII DPR melakukan kunjungan kerja ke Provinsi Kalimantan Selatan, Senin (14/07). Kunjungan kerja yang berlangsung di Graha Abdi Persada Kantor Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, Banjarmasin ini dalam rangka mencari masukan terkait RUU Perlindungan Anak.

“Setiap kunjungan itu ada hal yang di prioritaskan. Kebetulan Komisi VIII saat ini menggarap RUU Perlindungan Anak dimana kita tahu kasus kekerasan terhadap anak sudah marak terjadi di mana-mana, oleh sebab itu pertanyaan anggota banyak menanyakan masalah itu,” kata Mahrus Munir, Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI selaku Ketua Tim Kunker.

Menurut Mahrus, Tim Komisi VIII juga ingin mengetahui bagaimana perlindungan anak di daerah-daerah wilayah Kalimantan Selatan. Dan alhamdulillah sudah ada upaya perlindungan terhadap anak meskipun kita juga mendengar perlindungan anak selama ini terlupakan.

Adapun anggota Komisi VIII DPR RI yang ikut dalam kunker tersebut adalah Achmad Rumbaie, TB. H. Ace Hasan Syadzily, Ina Ammania, Ketua Sustiwawan, Idris Laena, Yetti Heryati, Mustafa Kamal, Fadil Muzzakkisyah, Ahmad Rifai Suftiadi, Noura Dian Har-

taryon, dan Nurul Iman Mustopa.

“Sekalipun masih banyak kekurangan soal perlindungan terhadap anak tadi kita juga mendengar dari Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan terhadap Anak banyak langkah-langkah yang dilakukan oleh Pemprov Kalimantan Selatan. Salah satu kunci pokoknya adalah perda perlindungan anak sudah ada, dari Reskrim Polda Kalsel juga menjelaskan di seluruh kabupaten/ kota sudah ada *call centre* pengaduan kekerasan terhadap anak.” kata Mahrus Munir.

Dalam acara ini hadir Gubernur Kalimantan Selatan, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi, MUI, Kapolda Kalsel, Dinas Sosial, KBP3 Provinsi Kalsel, dan Ketua Bazda. Pada pertemuan tersebut diserahkan juga bantuan asistensi sosial orang dengan kecacatan berat (ASOKDB) untuk 682 OKD berat bertahap dari bulan Mei sampai dengan Oktober 2014 total Rp. 1.227.000.000 dan bantuan asistensi sosial lanjut usia terlantar (ASLUT) untuk 1100 lansia terlantar mulai bulan Mei sampai dengan Agustus 2014 total Rp. 880.000.000 kepada Pemprov Kalsel. (Andri), foto : andri/parle/hr.

Komisi IX Minta Pemprov Sumut Turunkan AKI dan AKB

Komisi IX DPR RI melakukan Kunjungan Kerja (Kunker) ke Provinsi Sumut untuk mendapatkan informasi tentang realisasi program dan anggaran yang dibiayai pemerintah pusat terutama dibidang kesehatan, tenaga kerja dan kependudukan. Salah satu masalah yang disoroti adalah upaya menurunkan Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (ABI).

“Provinsi Sumut juga menghadapi tantangan pembangunan sebagaimana juga dihadapi provinsi-provinsi yang lain yaitu harus terus menerus melakukan upaya percepatan capaian target MDGs khususnya menurunkan Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB),” kata Ketua Tim Kunker Irgan Chairul Mahfiz dalam pertemuan di Kantor Gubernur, Medan, Sumut, Senin (14/7/14).

Ia menambahkan Komisi IX yang menjadi leading sector di DPR juga terus mengawasi pelaksanaan UU Kesehatan terutama terkait program Jaminan Kesehatan Nasional yang dilaksanakan oleh BPJS Kesehatan. Wakil Ketua Komisi IX ini juga mengajak Pemprov Sumut untuk serius mendukung program ini.

“Kita terus mengawasi pelaksanaan BPJS Kesehatan dan akan memastikan bahwa tidak akan ada lagi rakyat yang tertolak di rumah sakit sebagaimana



Ketua Tim Kunker Komisi IX DPR Irgan Chairul Mahfiz berdialog dengan mitra kerja

amanat UU Kesehatan. Pemprov Sumut kita imbau sepenuhnya mengintegrasikan Jamkesda ke dalam BPJS Kesehatan,” ujar Politisi FPPP ini.

Secara khusus ia juga menyampaikan apresiasi kepada Pemprov Sumut yang telah berhasil mengirimkan 100 persen TKI yang terlatih, keberhasilan yang menurutnya melebihi target nasional. Komisi IX menurutnya mendorong agar terus me-revitalisasi pusat-pusat pembekalan kerja termasuk Balai Latihan Kerja (BLK) dengan melakukan pembinaan dan pendampingan.

Gubernur Sumut dalam sambutan yang disampaikan Asisten III Arsyad Lubis menjelaskan upaya mendukung BPJS Kesehatan telah dilakukan diantaranya dengan menyediakan kamar layanan rawat inap kelas III sesuai kuota yang telah ditetapkan secara nasional.

“Jumlah tempat tidur rumah sakit yang tersedia 16475 unit sedangkan perawatan kelas III sebanyak 4932 unit. Maka sesuai perhitungan kuota penerima bantuan iuran untuk Sumut 4.192.297 jiwa maka kebutuhan akan

tempat tidur kelas III telah mencukupi," paparnya.

Salah satu masalah yang saat ini terus diupayakan penyelesaiannya adalah jumlah dan distribusi SDM kesehatan yang tidak merata diantara kabupaten/kota terutama tenaga dokter spesialis. Ini menyebabkan ketimpangan pelayanan kesehatan, kasus yang

seharusnya dilayani di RS daerah harus dirujuk ke provinsi sehingga tiga RS utama mengalami over capacity.

Data AKI dan AKB tahun 2013 di Provinsi Sumut terus menurun yaitu 259 jiwa, di bawah angka nasional 359 jiwa. Namun angka kematian ibu dan bayi ini harus terus ditekan sesuai target MDG's yaitu 102 per 1000

kelahiran dan untuk bayi 23 per 1000 kelahiran.

Tim Kunker Komisi IX ke Sumut adalah Dinajani H. Mahdi (FPD/Waka Komisi IX), Dhiana Anwar (FPD), Surya Chandra Surapati (FPDIP), Anshory Siregar (FPKS), Okky Asokawati (FPPP) dan Putih Sari (FP Gerindra). (iky), foto: *ibnur khalid/parle/hr.*

Indonesia Dapat Inisiasi Seret Israel Ke Mahkamah Internasional

Lebih dari enam hari Israel terus membombardir Jalur Gaza yang terisolasi sejak tahun 2007. Sedikitnya 78 warga Palestina di Gaza gugur dan 500 lainnya terluka. Sebagian besar merupakan warga sipil terdiri dari anak-anak dan wanita.

Menyikapi perkembangan yang kian memburuk di Jalur Gaza, Surahman Hidayat, Ketua BKSAP DPR RI, meminta pemerintah Indonesia untuk memberikan respon yang lebih tegas terhadap Israel. "Kami meminta Pemerintah dalam hal ini Kementerian Luar Negeri untuk memberikan respon yang lebih keras terhadap Israel. Tidak sekadar mengecam dan meminta DK Keamanan PBB agar Israel menghentikan serangan kejam tersebut," tegas Surahman dalam siaran pers di Jakarta, Selasa (15/7).

Lebih jauh politisi dari Fraksi PKS tersebut menambahkan, sebagai negara Muslim terbesar di dunia, Pemerintah Indonesia dapat menginisiasi negara-negara Muslim lainnya untuk bersama-sama menyeret Israel ke Mahkamah Internasional atas aksi genosida akhir-akhir ini di Jalur Gaza. "Saya kira jika kebijakan ini yang akan diambil pemerintah, DPR akan mendukung penuh," tegasnya.

Terkait peran apa yang dapat dilakukan oleh parlemen terhadap tragedi yang saat ini tengah menimpa Jalur Gaza, Surahman memaparkan, DPR RI



Ketua BKSAP DPR Surahman Hidayat

melalui BKSAP selalu konsisten untuk terus memberikan dukungan atas terwujudnya kemerdekaan Palestina. Sikap itu ditunjukkan dalam forum-forum parlemen, baik itu regional seperti APPF (Asia Pacific Parliamentary Forum) maupun internasional seperti dalam IPU (*Inter-Parliamentary Union*), atau PUIC (*Parliamentary Union of the OIC Member States*).

Bahkan pada Konferensi PUIC ke-9 di Palembang tahun Januari 2012, Delegasi DPR RI berhasil memasukkan klausul untuk melakukan kunjungan ke Jalur Gaza oleh pimpinan parlemen anggota-anggota PUIC. "Kami bersama Ketua DPR dan Grup Kerja Sama Parlemen Indonesia-Palestina pada 5 Desember 2012 berhasil berkunjung ke Gaza sebagai kunjungan pendahuluan

dari rencana implementasi dari keputusan Konferensi PUIC di Palembang tersebut," ungkap dia.

Dikemukakannya, jauh sebelum usulan PUIC, Ketua DPR RI dan Ketua BKSAP telah melakukan kunjungan ke Jalur Gaza pada tahun 2010 dimana situasi Gaza ketika itu persis seperti saat ini. "Inilah bentuk solidaritas DPR yang belum pernah dilakukan oleh pemerintah," tandas politisi PKS ini.

Terkait apa yang dapat dilakukan untuk membantu rakyat Gaza saat ini, Surahman berpandangan ada dua cara yaitu jalur bantuan kemanusiaan dan jalur politik. Pemerintah, DPR, dan LSM-LSM dapat bersinergi untuk memobilisasi penggalangan bantuan kemanusiaan secara massif untuk rakyat Gaza. Sementara secara politik, DPR dan Pemerintah dapat melakukan isolasi Israel dalam pergaulan internasional dalam banyak hal seperti dilakukan oleh beberapa negara Uni Eropa, seperti seruan penerapan kebijakan pemboikotan produk-produk Israel atau produk-produk yang diketahui mendukung penjajahan Israel atas bangsa Palestina.

Sementara isolasi Israel pada forum parlemen, kata Surahman, DPR dapat meminta kepada *Inter-Parliamentary Union* atau IPU agar mempertimbangkan kembali keanggotaan Parlemen Israel. (*bksap,mp*)/foto:*iwan armanias/parle.*

Anggota DPR Mendatang Diminta Bekerja dengan Hati

Para anggota DPR hasil pemilu 2014 yang akan dilantik 1 Oktober mendatang diharapkan bekerja dengan hati nurani dan memosisikan jabatan sebagai amanah yang akan dipertanggungjawabkan di dunia dan akhirat. Bila itu dilakukan, maka mereka akan berbuat yang terbaik untuk bangsa dan negara.

“Saya berharap mudah-mudahan para anggota DPR yang akan datang bekerja dengan hati. Saya yakin semua anggota DPR bisa menjadi vokal, dan menjadi bintang,” ungkap anggota DPR Indra kepada Parle di Jakarta baru-baru ini.

Hal itu diungkapkannya sehubungan akan berakhirnya masa jabatan anggota DPR periode 2009-2014 pada akhir September 2014. Politisi PKS yang dikenal vokal dan teguh memperjuangkan aspirasi rakyat ini semula merasa pesimis atas pelaksanaan pilg 9 April lalu yang marak *money politic* dan kecurangan sehingga ada kekhawatiran terhadap portret DPR yang akan datang, terlebih DPR adalah lembaga negara yang mengatur kebijakan strategis di negeri ini.

“Memang agak mengkhawatirkan sebenarnya. Tetapi mudah-mudahan nanti masih ada orang-orang idealisme yang terpilih menjadi wakil rakyat. Tentu kita harapkan mereka bisa jadi motor penggerak,” ujar Indra.

Politisi vokal yang aktif sebagai anggota Tim Pengawas TKI dan Panja *Outsourcing* serta anggota Timwas Century ini tidak terpilih kembali untuk periode 2014/2019. Karena itu dirinya menaruh harapan yang besar kepada anggota Dewan



Anggota DPR Indra

periode selanjutnya, agar memperjuangkan suara hati rakyat dan berjuang bukan untuk kepentingan kelompok, golongan atau untuk memperkaya diri sendiri.

Terkait dengan harapan tersebut, ia menegaskan ketika siapapun nantinya menjadi anggota legislatif harus menjadi wakil rakyat yang sebenarnya, dalam artian harus memiliki sikap yang mau memperjuangkan suara hati rakyat. “Berjuang bukan untuk kepentingan kelompok maupun golongan bahkan untuk memperkaya diri sendiri,” kata Indra lagi. (spy)/foto:odjie/parle/iw.

Voting Untuk Pilih Ketua DPR Bukan Hal Baru

Ketua DPR RI Marzuki Alie mengungkapkan, bahwa pemilihan Ketua atau Pimpinan DPR berdasarkan pemungutan suara (*voting*) seperti yang tercantum dalam UU MD3 yang disetujui dan disahkan DPR beberapa hari lalu sejatinya bukanlah hal baru. Hal tersebut diungkapkan Marzuki usai buka puasa bersama Presiden SBY, Wapres Boediono beserta jajaran menteri Kabinet Indonesia Bersatu Jilid II, Jumat (11/7).

“Pada 2004 silam mekanisme yang dipakai juga dengan menggunakan pilihan anggota DPR. Hasilnya, meski Demokrat menjadi partai penguasa, namun Demokrat tak satupun mendapat jatah pimpinan DPR. Waktu itu koalisi kebangsaan PDIP dan Golkar menguasai suara DPR. “Jadi saya ingat sekali sejarah 2004 dulu ketika Demokrat pertama kali di DPR sama persis dengan revisi UU MD3 saat ini,” ungkap Marzuki.



Ketua DPR RI Marzuki Alie dan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono

Dijelaskan Marzuki bahwa saat ini terjadi situasi dimana partai-partai (tidak termasuk Demokrat) merasa dinafikan oleh partai lain. Seolah-olah partai lain tersebut tidak memerlukan dukungan DPR agar pemerintahan dapat berjalan. Hingga akhirnya partai-partai tersebut bersatu untuk mengembalikan lagi kondisi seperti pada tahun 2004 silam.

Dilanjutkannya, tahun 2009 pengaturan mekanisme penetapan ketua DPR berubah menjadi pemilihan dengan partai suara terbanyak dalam pemilu yang berhak men-

duduki kursi ketua atau pimpinan DPR RI, atau dengan kata lain parpol pemenang pemilu yang berhak menduduki jabatan kursi ketua DPR. Hingga kemudian Partai Demokrat menjadi pemenang pemilu, dan secara otomatis partai ini berhak menentukan kadernya untuk menjadi Ketua DPR.

“Jika kemudian PDIP selaku partai pemenang pemilu 2014 tidak setuju jika peraturan lama tersebut dikembalikan lagi, mereka bisa menggugat ke MK, agar kita punya UU yang berlaku,” tegas Marzuki. (Ayu) /foto:denus/parle/iw.

Polri Perlu Antisipasi Kamtibmas Jelang Pengumuman Pilpres dan Mudik

Sebentar lagi kaum muslimin Indonesia akan merayakan hari lebaran Idul Fitri, dan dalam tradisi ini banyak yang akan mudik pulang kampung. Karena itu pemerintah dan jajaran terkait mulai Kementerian Perhubungan, Kementerian Pekerjaan Umum (PU) dan Kepolisian serta instansi terkait lainnya diminta untuk dapat memfasilitasi kaum muslimin Indonesia yang akan merayakannya di kampung halaman masing-masing.

Demikian harapan anggota Komisi III DPR Achmad Basarah dalam perbincangan dengan Parle, sehubungan pengamanan Kamtibmas menjelang dan pengumuman pilpres tanggal 22 Juli dan mudik lebaran.

Menurut politisi PDI Perjuangan ini, meski sampai tanggal 22 Juli yang akan datang Polri masih akan disibukkan dengan tanggungjawabnya untuk mengawal rekapitulasi suara pilpres di seluruh Indonesia, dan tentu memerlukan energy dan perhatian yang besar, namun demikian bukan berarti kepentingan masyarakat yang



Anggota Komisi III DPR Achmad Basarah

lain, seperti memberi fasilitas kepada masyarakat yang akan mudik tidak diperhatikan.

Karena itu segala hal menyangkut keperluan mudik dari sarana transportasi masal dan jalan-jalan yang tidak baik sehingga mengancam pengendaraan, sampai gangguan bajing loncat, terorisme dan lainnya betul-betul bisa

diantisipasi oleh polri. Termasuk peran jajaran Kemenhub dan Kemen PU yang bertanggung jawab atas fasilitas jalan raya.

“Polri tidak boleh lengah, harus bisa membagi konsentrasi dan perhatian. Polri wajib mengawal rekapitulasi pilpres agar tidak terjadi kecurangan di mana-mana, tetapi juga wajib menjaga dan mengamankan masyarakat yang akan mudik,” tandas Achmad Basarah.

Dalam rapat dengan Komisi III, kata Basarah, Polri belum melaporkan adanya gangguan keamanan terkait mudik, namun belum tahu dengan perkembangan pilpres atau eskalasi politik terkait pilpres. Untuk itu di masa reses ini saya menghimbau Kapolri Jenderal Sutarnan untuk bisa mengintensifkan pengawasan termasuk deteksi dini terhadap segala macam gangguan Kamtibmas.

“Kita perlu memberikan dukungan penuh kepada polri agar bisa bekerja secara maksimal,” pungkas Achmad Basarah. (mp)/foto:odjie/parle/iw.

DPR Desak Segera Buka Kantor Perwakilan RI di Palestina

Ketua Komisi I DPR Mahfudz Siddiq mengatakan, pemerintah maupun masyarakat Indonesia telah menunjukkan solidaritas dan perhatian yang kuat terhadap Palestina, tetapi dengan situasi seperti sekarang diperlukan langkah-langkah yang lebih konkrit. Satu hal yang perlu menjadi perhatian

pemerintah adalah segera membuka kantor perwakilan di Palestina. Terhadap masalah ini ia melihat belum ada langkah maju.

Terakhir, kata Mahfudz, sudah ada calon untuk Konsul Kehormatan, tetapi sampai sekarang belum direali-

asikan. “Saya berharap Presiden SBY sebelum mengakhiri masa jabatannya untuk membuka kantor perwakilan di Palestina bisa terwujud. Dengan demikian ini menjadi salah satu warisan pemerintah SBY untuk solidaritas untuk Palestina,” ungkap politisi PKS ini.

Hal itu dikatakannya di Jakarta baru-baru ini menanggapi aksi Israel yang kian brutal terhadap Palestina, dan berdasarkan laporan terakhir jumlah korban tewas rakyat Palestina sudah mencapai 165 orang. Menurutnya, serangan brutal oleh Israel terhadap masyarakat sipil di Gaza patut dikecam masyarakat dunia, apalagi terjadi di bulan Ramadan-bulan yang disucikan oleh kaum muslimin. “Ini menunjukkan bagaimana sikap asli Israel untuk tetap bermusuhan dan peperangan terhadap bangsa Palestina yang mempertahankan tanah mereka sendiri,” ujarnya.

Lebih lanjut Pimpinan Komisi yang membidangi masalah luar negeri dan pertahanan ini, mengatakan, pembukaan kantor perwakilan itu sangat penting dan masyarakat Palestina mengakui belum adanya kantor perwakilan Indonesia di Palestina. Lagi-lagi ini menunjukkan kelemahan kita, pasalnya sejumlah negara seperti Malaysia dan Cina sudah punya kantor



Ketua Komisi I DPR Mahfudz Siddiq

perwakilan. Dari sisi kemanusiaan dan hubungan internasional sudah cukup baik.

Kata Mahfudz, dua tahun lalu saat bertemu Presiden Palestina Mahmud Abbas menyatakan sangat menunggu langkah riil pemerintah Indonesia untuk membuka kantor perwakilan dan mereka siap apakah di Gaza atau Ramallah atau di kedua tempat tersebut.

“Ini juga menjadi ujian para Capres,

apakah bisa menunjukkan komitmen mereka terhadap perdamaian dunia, terhadap negeri-negeri yang terjajah seperti Palestina,” katanya dengan menambahkan, energi kita jangan habis tersedot untuk pilpres sementara masih ada bangsa yang terdzalimi. Apalagi, konstitusi kita menegaskan ikut aktif menciptakan perdamaian dunia, membebaskan dari segala bentuk penjajahan.

Ia menambahkan, kejadian di Palestina ini juga menjadi ujian bagi negara-negara muslim dan negara di berbagai belahan dunia bagaimana mereka bisa merespon solidaritas terhadap masyarakat Palestina dan Gaza. “Saya juga tidak mengerti banyak negara yang bungkam, padahal kejahatan perang ini sudah sangat tidak bisa ditolerir. Saya harap pemerintah meski sedang menghadapi hajat Pilpres, tidak boleh lalai terhadap saudara kita di Palestina dan Gaza,” ungkap Mahfudz Siddiq menambahkan. (mp)/foto:iwan armanias/parle.

Presiden SBY : Pro-Kontra Hal Yang Biasa



Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Ketua DPR RI Marzuki Alie foto bersama usai buka puasa

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono meminta bangsa Indonesia untuk mengambil hikmah dari negara yang dilanda peperangan. Sebab saat ini bangsa Indonesia hidup damai. Hal tersebut diungkapkan Presiden dalam sambutan acara buka puasa bersama di kediaman Ketua DPR RI, Marzuki

Alie, Jumat (11/7).

Terkait dengan agresi militer Israel di jalur Gaza, SBY mengaku telah berkomunikasi dengan Presiden Iran selaku Ketua Gerakan Non Blok untuk membahas situasi Palestina. Ia menyerukan kepada semua pihak di dunia

untuk menekan Israel menghentikan serangannya di jalur Gaza. Lebih lanjut SBY berdoa agar negara yang tengah terjadi konflik dan peperangan dapat kembali hidup rukun berdampingan.

“Kita harus petik pelajaran dan bersyukur kepada Allah SWT bahwa kita masih bisa menjalankan ibadah dengan baik. Betapa pentingnya keamanan dan kerukunan sosial. Adapun dinamika di negeri ini janganlah memecah kebersamaan kita. Karena sekali terpecah, maka sulit menyatukan kembali. Sebagaimana konflik di Thailand, meski kondisi negeri itu sudah tidak ada peperangan namun suasana negeri itu belum terlalu stabil,” ungkap Presiden.

Ditambahkan SBY, pro dan kontra terhadap suatu hal adalah hal yang wajar, bahkan selama sepuluh tahun kepemimpinannya, kritikan juga kerap diterimanya, termasuk dari parlemen, media atau masyarakat. Namun ia selalu menerima kritikan tersebut dengan baik.

“Saat merasa parlemen kritis, me-

dia kritis, masyarakat kritis. Dengan kritikan tersebut kita harus hati-hati. Barangkali dengan sikap kritis itulah

orang seperti saya bisa bertahan hingga sepuluh tahun. Kalau tidak, mungkin tidak bisa mengakhiri pemerintah-

an dengan baik,” pungkasnya. (Ayu)/
foto:denus/parle/iw.

Sosialisasi Formulir A 5 Minim

Secara umum, Pemilihan Umum Calon Presiden dan Wakil Presiden berlangsung dengan aman, tertib, dan lancar. Namun, ada aspek yang masih menjadi permasalahan, dan menjadi pekerjaan rumah Komisi Pemilihan Umum, yaitu nasib para pemilih di perantauan yang tidak bisa mencoblos di TPS, karena belum mengurus Formulir Model A5.

Sebagaimana diketahui, Formulir A5 adalah formulir yang memberi kesempatan kepada pemilih untuk tetap menggunakan hak pilih, meski terpaksa harus bepergian ke luar kota karena urusan pekerjaan atau kepentingan lain. Pemilih cukup mengurus formulir A5 dari kantor Panitia Pemungutan Suara (PPS) kelurahan/desa tempat asal. Formulir tersebut nantinya akan diserahkan ke PPS tempat di mana pemilih akan menggunakan hak suaranya.

Wakil Ketua Komisi II DPR Abdul Hakam Naja menilai sosialisasi Formulir A5 memang masih minim dan kurang merata. Selain itu, dengan mepetnya waktu, dan belum tentu si pemilih kembali ke daerah asal hanya untuk mengurus formulir tersebut.

“Banyak perantau tidak mungkin mengurus Formulir A5 ke daerah asal. Padahal, bisa menggunakan teknologi canggih seperti fax atau e-mail. Tapi, penyelenggara pemilu di daerah juga tidak familiar dengan sistem ini. Saya kira ini menjadi masukan yang berharga, bahwa ke depan pola pindah pilih ini betul-betul ditangani dan dikelola lebih baik, sehingga hak warga negara tidak dirugikan,” jelas Hakam, sesaat sebelum Sidang Paripurna, di Gedung Nusantara II, Kamis (10/07).

Permasalahan yang sama juga terjadi pada jamaah umroh di Mekkah. Ada ribuan warga Indonesia di sana yang tidak bisa mencoblos karena tidak mengurus Formulir A5. Hakam kembali menyatakan bahwa sosialisasi sangat minim. Padahal, ibadah umroh sudah diketahui waktunya, sehingga seharusnya sudah diperhitungkan untuk mengurus Formulir A5.

“Ada ribuan (jamaah umroh) disana. Saya kira ke depan



Wakil Ketua Komisi II DPR Abdul Hakam Naja

ini harus diatur dengan teknologi dan informasi yang sudah semakin bagus. Informasi awal tentang bagaimana kalau pindah itu harus diinformasikan secara lebih meluas dan sosialisasi harus digalakan karena yang umroh bisa ribuan. Artinya kalau dari awal, orang sudah merencanakan itu kan bisa ditambah surat suara cadangannya,” kritik Politisi PAN ini.

Artinya, tambah Hakam, jika memang Formulir A5-nya sudah diketahui jumlahnya, maka bisa diusulkan jumlah surat suara cadangan tidak hanya 2 persen, karena ada tambahan perpindahan orang dari Indonesia yang akan mencoblos di Mekkah.

“Ini menjadi masukan yang sangat berharga dengan banyaknya atau ribuan yang tidak bisa menggunakan haknya karena problem Formulir A5,” tutup Politisi asal Dapil Jawa Tengah ini. (sf, zah)/foto:iwan armanias/parle/iw.

DPR Prihatin Kondisi Gaza

Ketegangan antara Israel dengan Palestina belum usai. Bahkan, kondisi Gaza semakin memanas, hingga mengakibatkan banyak korban yang berjatuh akibat serangan Israel. Serangan tersebut diduga merupakan serangan balasan, karena masih ad-

anya ketegangan antara kedua negara ini.

Melihat kondisi Gaza, Palestina, Anggota Komisi I DPR Susaningtyas Nefo Handayani Kertapati merasa prihatin. Ia mengecam tindakan serangan yang

telah dilakukan oleh Israel, karena ini kejadian sangat memilukan bagi kaum muslimin. Bahkan, rakyat tak berdosa telah menjadi korbannya.

“Kondisi Gaza ini memang sangat mengejutkan. Ancaman tersebut



Anggota Komisi I DPR Susaningtyas Nefo Handayani Kertapati

tanpa mempedulikan akibat dari kehidupan sosial dan ekonomi,” tutur Ning, sapaan akrab Susaningtyas, saat ditemui sebelum Sidang Paripurna, di Gedung Nusantara II, Kamis (10/07).

Politisi Hanura ini mengajak masyarakat Gaza, termasuk masyarakat dunia untuk tetap optimis dan mendukung Palestina dalam menghadapi serangan Israel. Palestina harus mendapat dukungan dan perhatian yang sungguh.

“Perjuangan itu dilandasi dengan adanya optimisme, apabila tidak memiliki optimisme lagi maka ini akan sulit. Tentunya kita harus mendukung

saudara kita seumat. Indonesia sudah memiliki komitmen untuk mendukung Palestina, maka ini suatu hal yang diperhatikan dengan sungguh-sungguh. Dukungan ini mengacu pada kondisi yang lebih baik di masa depan,” tambahnya.

Politisi asal Dapil Jawa Tengah ini menyatakan pihaknya akan membicarakan krisis Gaza ini dengan pihak Pemerintah, sehingga ada tindakan untuk membantu saudara-saudara di Palestina. “Setidaknya, ada dukungan dari luar negeri bagi Gaza, salah satunya oleh Indonesia,” tutup Ning. (sf,br)/
foto:iwan armanias/parle.

RUU Pertembakauan Disetujui Jadi Usul Inisiatif DPR



Anggota Komisi VIII DPR Sumarjati Arjoso

Catatan dari dua Anggota DPR menyertai persetujuan Rancangan Undang-undang Pertembakauan menjadi Usul Inisiatif DPR, saat dibahas di Sidang Paripurna, Kamis (10/07). Catatan pertama, datang dari Anggota Komisi VIII DPR Sumarjati Arjoso. Ia meminta, persetujuan terhadap RUU ini dikaji ulang.

“Berkaitan dengan RUU Pertembakauan, kami memohon kita semua untuk berpikir kembali. UU ini untuk kepentingan siapa. Apakah untuk rakyat, atau untuk pemilik industri? Karena sesuai dengan di berbagai media massa, ini sangat merugikan masyarakat kita,” kata Sumarjati.

Politisi Gerindra ini memaparkan data dari Badan Pusat Statistik, bahwa kemiskinan di Indonesia bertambah akibat kontribusi dari konsumsi rokok. Pasalnya, angka konsumsi rokok menjadi pengeluaran kedua terbesar setelah beras.

“Kalau UU ini untuk petani, sudah ada UU No 19 Tahun 2013, tentang pemberdayaan dan perlindungan petani. Kalau semua komoditi ada UUnya, berarti nanti ada UU Perkerentan, Perberasan, dan lain-lain. Di sisi lain, RUU Pertembakauan ini jelas mengancam kesehatan dan keselamatan rakyat. Data dari riset Kementerian Kesehatan menunjukkan, 59 persen kematian di Indonesia karena penyakit tidak menular, dan ini utamanya disebabkan oleh rokok,” papar Sumarjati.

Ia bahkan menyangkal, terpuruknya petani tembakau bukan karena regulasi, tetapi karena memang ulah pabrikan industri rokok. Hal ini menunjukkan tidak keberpihakan kepada petani, dan malah petani selain tembakau yang lebih sejahtera.

“Kami mohon kita berpikir ulang dan sebisanya kita tolak karena hal ini sangat mengganggu kesejahteraan masyarakat kita, dan ini membuat masyarakat lebih suka merokok,” pinta Ketua BAKN ini.

Hal senada diungkapkan Anggota Komisi IV DPR Firman Subagyo. Ia meminta agar pembahasan RUU ini dikaji lebih mendalam di Pansus. Pasalnya, RUU ini menyangkut berbagai aspek.

“Kami ingin mengingatkan RUU ini pernah diajukan, namun ditunda. Mengingat bahwa RUU ini menyangkut beberapa aspek, terkait dengan perindustrian, perdagangan, keuangan dan juga masalah kesehatan, oleh karena itu kami menginginkan kesepakatan untuk pembahasan yang akan datang dibentuk Pansus sehingga ini belum menjadi suatu keputusan paripurna,” jelas Firman.

Pada kesempatan yang sama, masing-masing fraksi menyampaikan pandangan fraksinya secara tertulis kepada

Pimpinan Sidang. Walaupun ada beberapa catatan yang menyertai, akhirnya RUU ini disepakati menjadi usul inisiatif DPR.

“Berkaitan dengan RUU Pertembakauan dengan catatan tersebut dari Bu Sumarjati Arjoso dan Pak Firman Subagyo,

yang nanti akan kita selesaikan dalam rapat Badan Musyawarah, apakah RUU Tembakau dapat disetujui sebagai RUU Usul Inisiatif DPR?” tanya Wakil Ketua DPR Pramono Anung kepada seluruh Anggota Dewan yang hadir. Jawaban setuju pun terdengar di Ruang Paripurna, Gedung Nusantara II. (sf)/foto:iwan armanias/parle/iv.

Pemotongan Anggaran Kementerian Amankan Fiskal APBN 2014

Ketua DPR Marzuki Alie mengatakan, pengurangan anggaran belanja Kementerian atau Lembaga serta belanja lainnya sejalan dengan semangat yang tertuang dalam Inpres No.4 tahun 2014. “Pemotongan tersebut bertujuan untuk kesinambungan dan keamanan fiskal APBN 2014 dapat terjaga,” ujar Ketua DPR saat menyampaikan Pidato Penutupan Masa Sidang IV, di Gedung Nusantara II, Kamis, (10/7).

Sementara terkait pelaksanaan fungsi anggaran, kata Marzuki, Dewan juga telah menyelesaikan pembahasan RUU Tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2013 tentang APBN Tahun Anggaran 2014.

Secara garis besar kesepakatan yang dicapai antara lain Pertumbuhan Ekonomi (PDB) 5,5%; Inflasi 5,3%; nilai tukar Rupiah Rp. 11.600,- per dolar AS; Lifting minyak bumi 818.000 per barel; Lifting gas bumi sebesar 1.240.000 barel per hari setara minyak bumi. Sedangkan defisit anggaran disepakati menjadi sebesar 2,4% dari PDB.

Dia menambahkan, dalam masa sidang ini Komisi dan Badan Anggaran telah melakukan pembahasan terhadap Rencana Kerja Pemerintah (RKP)



Ketua DPR RI Marzuki Alie

Tahun 2015 dan Pembicaraan Pendahuluan penyusunan RAPBN Tahun Anggaran 2015.

Menurutnya, RKP tahun 2015 harus sesuai dengan misi dan arah pembangunan nasional yang diamanatkan dalam UU No. 17 Tahun 2007 tentang

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2005–2025 Tema RKP tahun 2015 adalah “Melanjutkan Reformasi Pembangunan Bagi Percepatan Pembangunan Ekonomi Yang Berkelanjutan”. (si)/foto:iwan armanias/parle.

Salah Kelola, Merpati Rugikan Keuangan Negara

Salah kelola dengan *human error* dan praktik KKN menjadi sumber kerugian di PT Merpati Nusantara Airlines. Akibatnya, negara juga dirugikan dengan membebani keuangan

negara. Inilah kesimpulan yang disampaikan Panja Komisi VI DPR RI menyangkut pengelolaan maskapai penerbangan plat merah Merpati Airlines.

Raker Komisi VI DPR dengan Meneg BUMN Dahlan Iskan baru-baru ini menyampaikan, laporan akhir panja tentang berbagai temuan salah kelola dan salah kebijakan di internal Merpati. Sejak tahun 1998 Merpati sudah mulai merugi dan terus bertambah hingga saat ini dengan total utang per Januari 2014 sebesar Rp7,647 triliun.

Di antara butir kesimpulan Panja Komisi VI menyebutkan, Menteri BUMN selaku kuasa pemegang saham tidak menjalankan fungsi pembinaan dan pengawasan terhadap PT. Merpati Nusantara Airlines sebagai BUMN. Prinsip kehati-hatian juga tidak diterapkan oleh manajemen dalam mengelola perusahaan. Penyalahgunaan wewenang sering kali terjadi yang mengakibatkan perusahaan kian terpuruk.

Bahkan, perusahaan sudah berhenti karena tak sanggup lagi membeli BBM. Ini indikasi perusahaan telah digerogoti dari dalam. Pemanfaatan aset produktif juga tidak dilakukan dengan maksimal, seperti Merpati Maintenance Facility (MMF) dan Merpati Training Centre (MTC) tidak dikelola secara profesional. Dengan begitu, tak ada pemasukan keuangan bagi perusahaan.

Sementara itu, Komisi VI juga menyampaikan butir rekomendasi kepada Meneg BUMN yang diantaranya meminta BPK untuk melakukan audit investigasi terhadap PT. Merpati Nusantara Airlines. Hal yang paling mengundang kontroversial adalah pengadaan pesawat MA-60 Merpati dari Xian Aircraft Industry yang terindikasi korupsi. Untuk itu,



Wakil Ketua Komisi VI DPR Erik Satrya Wardhana

BPK juga diminta mengaudit proses pengadaan ini.

Rekomendasi lainnya dari Panja, Merpati diminta mem-berhentikan segera direksi PT Merpati Nusantara Airlines dan menggantinya dengan yang baru. Selanjutnya, Merpati juga diminta mengajukan pola restrukturisasi utang jangka panjang sekaligus menyelesaikan utang kepada karyawan Merpati. (mh)/foto:odjie/parle/iw.

Penyandang Disabilitas Sulsel Akan Dapatkan SIM Gratis



Pejabat Polri Sulsel Anwar Dia

Kabar gembira bagi penyandang disabilitas di Sulawesi Selatan. Mereka dijanjikan akan mendapatkan Surat Ijin Mengemudi (SIM) gratis alias tidak perlu mengeluarkan biaya. Hal itu mengemuka saat Tim Kunjungan Kerja Badan Legislasi DPR dipimpin Didi Irawadi Syamsudin, Jumat (4/7) menggelar pertemuan dengan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan Agus Arifin Nu'mang dan jajarannya termasuk wakil

dari Polda Sulsel, di kantor Pemprov Sulsel, Makassar.

Dalam pasal 88 RUU Penyandang Disabilitas yang merupakan usul Inisiatif DPR ini diatur bahwa Kepolisian wajib menyelenggarakan tes aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas untuk mendapatkan Surat Ijin Mengemudi (SIM).

“Dengan memperhatikan ketentuan pasal 88 tersebut, kami polri di Sulse akan membebaskan biaya atau gratis bagi penyandang disabilitas untuk mendapatkan SIM. Ini merupakan bentuk perhatian pemerintah kepada penyandang disabilitas,” ungkap salah seorang pejabat Polri Sulsel Anwar Dia, yang hadir dalam pertemuan tersebut.

Sikap peduli jajaran kepolisian ini langsung mendapat apresiasi para anggota Baleg DPR. Anggota Tim Syaiful Anwar (FPD), Idris Laena (FPG), Irmadi Lubis (F PDI Perjuangan), Buchori Yusuf dan Indra (FPKS), Muhajir (FPAN) dan Djamal Azis (F Hanura) menyambut baik jajaran kepolisian yang siap membantu penyandang disabilitas. Sikap tersebut sesuai dengan materi muatan RUU yaitu perubahan paradigma dari *charity based* (belas kasih) ke *rights based* (hak).

Selain itu perubahan terminology “penyandang cacat” menjadi “penyandang disabilitas” dan perubahan dari minimalnya pengaturan tanggungjawab negara menjadi pemaksimalan pengaturan tanggungjawab negara terhadap penyandang disabilitas.

RUU ini juga mengatur adanya sanksi yang tercantum dalam pasal 100, “Setiap pemberi kerja yang memutus hubungan kerja dengan alasan disabilitas sebagaimana

diatur dalam pasal 52 ayat (1) dikenai denda paling sedikit Rp 500 juta dan/atau pidana penjara paling lama 1 tahun”.

Pasal 101, “Setiap orang yang menghalangi dan/atau menghilangkan hak Penyandang Disabilitas untuk dipilih sebagai pejabat publik sebagaimana diatur pasal 59 ayat(1) dikenai denda paling sedikit Rp 500 juta dan /atau denda pidana penjara paling lama 1 tahun”. (mp)/foto:mastur/parle/iw.

DPR Telah Banyak Berbenah

Ketua DPR RI, Marzuki Alie, Jumat (11/7) menggelar acara buka puasa bersama. Pada Kesempatan itu hadir Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Ny. Ani Yudhoyono, Wakil Presiden Boediono dan Ny. Herawati Boediono. Tak ketinggalan pula Wakil Ketua DPR, Pramono Anung serta beberapa Kepala Lembaga Negara lain, dan jajaran menteri Kabinet Indonesia Bersatu jilid II.

Dalam sambutannya selaku tuan rumah Marzuki mengungkapkan bahwa sejatinya buka puasa tersebut merupakan buka puasa terakhir dirinya sebagai pimpinan DPR RI. Oleh karena itu pihaknya berterimakasih kepada Presiden SBY beserta istri, dan Wapres Boediono beserta istri yang selama menjabat tidak pernah absen untuk menghadiri undangan buka puasa bersama di kediamannya.

“Buka puasa selama ini juga untuk menjalin tali silaturahmi, memperpanjang usia dan menambah rizki,” ungkap Marzuki.

Marzuki menambahkan bahwa wajah DPR sejak masa orde baru hingga masa reformasi dan demokrasi seperti saat ini telah dilakukan banyak pembenahan. Dalam hal kesekjenan misalnya, meski tersendat-sendat dalam kurun waktu lima tahun telah banyak perubahan menuju perbaikan yang telah dijalaninya. Tak berlebihan jika kemudian lebih dari tiga puluh penghargaan diraih Kesetjenan DPR.



Ketua DPR RI Marzuki Alie

Begitupun halnya dengan wajah DPR sebagai institusi Politik. Khusus hal yang satu ini, Partai Politik memiliki peranan penting dalam merubah DPR ke arah yang lebih baik lagi. Karena anggota DPR dipilih oleh Parpol yang kemudian diserahkan kepada masyarakat.

“Insya Allah DPR sebagai lembaga politik akan berwajah lebih baik lagi, karena ke depan anggota DPR akan dibantu oleh Tenaga Ahli (TA) sebagai tenaga fungsional yang profesional. Sehingga ke depannya anggota DPR murni akan berbicara masalah politik saja, tidak yang lainnya. Sehingga

berapapun UU yang ditargetkan, akan diselesaikan dengan baik,”paparnya.

Marzuki berterimakasih kepada seluruh pihak yang telah bekerjasama dengan baik kepada DPR dalam menjalankan tiga fungsi legislasinya. Sebagai manusia biasa, Marzuki juga memohon maaf jika selama ini memiliki salah, namun hal tersebut merupakan kekhilafan semata dan tidak ada maksud bagi dirinya untuk menyakiti. Ia berharap ke depannya silaturahmi dapat terus berlangsung dengan baik, dan kondisi bangsa Indonesia juga menjadi lebih baik lagi. (Ayu)/foto:denus/parle/iw.



Wakil Ketua Komisi I DPR RI Tantowi Yahya dalam diskusi Forum Legislasi tentang RUU Radio Televisi Republik Indonesia (RUU RTRI), Selasa (15/7). Foto: Iwan Armanias/Parle



Tim Kunker Komisi VII DPR RI saat pertemuan dengan PT PLN Persero (kiri) dan PT Pertamina (kanan) wilayah Nusa Tenggara Barat, Selasa (16/7). Foto; Rizka/Parle/Hr.



Tim Kunker Komisi IX DPR RI saat pertemuan dengan mitra kerja di Medan, Sumatera Utara, Senin (14/7). Foto: Iky/Parle/Hr.